



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang dilaksanakan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI BATANG,


WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 3 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR..17..

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|--|----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan partisipatif | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | 1 Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang | 1 | Indeks yang didapat dari survey kepuasan masyarakat (SKM) | SETDA |
| | | | | 2 | Jumlah OPD yang telah memiliki SPP dan SOP dikalikan 100% | SETDA |
| 2. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip- | Indeks Profesionalitas ASN | 2 Persentase PD yang telah memiliki website aktif | 1 | Jumlah PD yang telah memiliki website aktif dibagi jumlah PD yang telah memiliki website dikalikan 100% | DISKOMINFO |
| | | | | 2 | Cukup jelas | BKD |
| | | Skor LAKIP/ LKJIP | | | Nilai yang didapatkan dari Kempenan RB | SETDA |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab | |
|----|---|------------------|--|-------------------|--|---|-------------|
| 3 | Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergis dan kerjasama pembangunan daerah | 1 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 1 | Opini BPK | Predikat yang didapatkan dari BPK RI atas laporan keuangan | INSPEKTORAT |
| | | | | 2 | Skor PeGi (Pemerintahan E-Government) | Sudah jelas | DISKOMINFO |
| | | | | 3 | Smart City /Smart Village | Sudah jelas | DISKOMINFO |
| | | | | 4 | Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) | Nilai yang didapat dari kementerian RB | INSPEKTORAT |
| | | | | 5 | Presentase ASN yang mengikuti diklat | Jumlah ASN yang mengikuti diklat dibagi jumlah ASN dikalikan 100% | BKD |
| 1 | Persentase OPD inovatif | 1 | Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan | 1 | Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran | Sudah jelas | BAPELITBANG |
| | | | | 2 | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan | Sudah jelas | BAPELITBANG |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | 3 Persentase peningkatan PAD | PAD tahun (n-1) dikurangi PAD tahun N dibagi PAD Tahun N dikalikan 100% | BPPPAD |
| | | | 2 Meningkatnya sinergitas dan kerjasama antar daerah (KAD) | Persentase OPD yang melakukan KAD | Jumlah OPD yang melakukan KAD dibagi jumlah OPD yang ada dibagi 100% | SETDA |
| 4. | Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya | 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik | 1 Angka Kematian Ibu (AKI) | Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup disuatu wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dikalikan 100.000 | DINKES |
| | | | | 2 Angka Kematian Bayi (AKB) | Jumlah kematian bayi (umur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikalikan 1000 | DINKES |
| | | | | 3 Angka Kematian Balita (AKBA) | Jumlah kematian balita (umur kurang 5 tahun) | DINKES |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5. | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk | 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kualitas | 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi | Cukup jelas Cukup jelas jumlah LPM berprestasi | DP3AP2KB DP3AP2KB DP3AP2KB |
| | | | | | | |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | hidup perempuan dan pemenuhan hak anak | 2 Persentase perempuan di lembaga legislatif | Jumlah perempuan di lembaga legislatif dibagi jumlah pekerja perempuan dikalikan 100% | DP3AP2KB |
| | | | | 3 Kecamatan ramah anak | Jumlah kecamatan yang sudah memenuhi kriteria kecamatan ramah anak di bagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan 100% | DP3AP2KB |
| | | | Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh | 1 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | Jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur | DP3AP2KB |
| | | | | 2 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | Jumlah penduduk usia >17 tahun yang berKTP dibagi jumlah penduduk usia > 17 atau yang telah menikah | DISDUKCAPIL |
| 6 | Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif | 1 Persentase pemuda berwirausaha | 1 Meningkatnya kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha | 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif | Jumlah pemuda berwirausaha dibagi jumlah pemuda dikalikan 100 % Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda dikalikan 100% | DISPERINDAGKOP DAN UKM DISPARPORA |


| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab | |
|----|--|--|--|-------------------|---|---|------------------------|
| 7 | Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur | 1 | Meningkatnya akses permodalan, kualitas, dan daya saing koperasi dan UMKM | 1 | Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi dikalikan 100% | DISPERINDAGKOP DAN UKM | |
| | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 8 | Meningkatkan pemerataan dan kualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) | Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang | 1 | Jumlah realisasi nilai investasi | Jumlah realisasi nilai investasi | DPMPPTSP |
| | | | | 2 | Rasio daya serap tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibagi jumlah seluruh PMA/PMDN | DISNAKER |
| | | | | 3 | Pertumbuhan industri | Jumlah industri tahun N dikurangi jumlah industri tahun N-1 dibagi jumlah industri sampai dengan tahun N dikalikan 100% | DISPERINDAGKOP DAN UKM |
| | | | | 4 | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB | Jumlah sektor perindustrian dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100% | DISPERINDAGKOP DAN UKM |
| 8 | Meningkatkan pemerataan dan kualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) | | | Cukup jelas | DLH | |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|--|----------------------------|---|--|---|-----------------|
| | membangun infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | | 1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah | 1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut dikalikan 100% | DPU PR |
| | | | | 2 Rasio ijin trayek | Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikalikan 100% | DISHUB |
| | | | | 1 Rasio ruang terbuka hijau | Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau | DLH |
| | | | | 2 Persentase penanganan sampah | Jumlah sampah yang ditangani dibagi jumlah seluruh sampah dikalikan 100% | DLH |
| | | | | 3 Pemantauan status mutu air | Cukup jelas | DLH |
| | | | 2 Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan air baku dan penanggulangan masalah rob dan abrasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan | 4 Uji Sampel Kualitas air sungai | Cukup jelas | DLH |
| | | | | 5 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi Kabupaten dikalikan 100% | DPUPR |
| | | | | | | |
| 9 | Mengembangkan dan mengintegrasikan | 1 Nilai Tukar Petani (NTP) | | | Indeks yang diterima petani (It) dibagi indeks | DISPAPERTA |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|--|--|---|---|--|------------------------|
| | agrobisnis dan agrowisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Barang | | | | yang dibayar petani (lb) dikalikan 100 | DISPAPERTA |
| | | | Meningkatnya produktivitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan | 1 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB | Jumlah kontribusi sektor pertanian dibagi jumlah PDRB ADHB sektor pertanian dikalikan 100% | DISPAPERTA |
| | | | | 2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah | Cukup jelas | DISPAPERTA |
| | | | | 3 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100% | DISPERINDAGKOP DAN UKM |
| 10 | Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktivitas perikanan dan kelautan yang lestari | 1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 1 Berkembangnya obyek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir | 1 Peningkatan jumlah wisatawan | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata dibagi jumlah PDRB ADHB dikalikan 100% | DISPARPORA |
| | | | | 2 Meningkatkan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya yang lestari | Cukup jelas | DISPARPORA |
| | | | | 1 Produkasi perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap tahun N | DISLUTKANAK |
| | | | | 2 Produkasi perikanan budidaya | Jumlah produksi perikanan budidaya tahun N | DISLUTKANAK |

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Penanggungjawab |
|----|--|---|--|--|--|-----------------|
| 11 | Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengamalan nilai agama dan budaya | 1 Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk | 1 Terciptanya keamanan lingkungan dan <i>early warning system</i> penganggulangan kriminalitas | 1 Rasio pos siskamling per jumlah desa/ Kelurahan | Jumlah Linmas dibagi jumlah penduduk dikali 10.000 | SATPOL PP |
| | | | | 2 Persentase ketersediaan peta resiko bencana | Cukup jelas | BPPD |
| 12 | Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya Luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh | 1 PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos | 1 Meningkatkan integritas nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat | 1 Jumlah grup kesenian yang dibina | Jumlah grup kesenian yang dibina | DISPARPORA |
| | | | | 2 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil | DINSOS |
| | | | | | | |

BUPATI BATANG,


WIHAJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab | |
|---------------------------|------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| <i>Sekretariat Daerah</i> | | | | | | | |
| 1. | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Batang | 1 | Meningkatnya Nilai Evaluasi LKjIP Kab | Hasil penilaian dari Kemenpan RB terhadap AKIP Kabupaten | Bagian Organisasi | setda |
| | | | 2 | Meningkatnya Nilai Evaluasi LKjIP Setda | Skor LKjIP tahun N | Bagian organisasi | setda |
| | | | 3 | Ketepatan Waktu Penyusunan LPPD dan LPPD AMJ , LKPJ dan LKPJ AMJ serta Memori Bupati | Ada/ tidak dokumen | Bagian Pemerintahan | setda |
| | | | 4 | Presentase Lelang Melalui <i>e-procurement</i> | Jumlah paket yang dilelang dibagi jumlah total paket lelang dikalikan 100% | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | setda |
| 2. | | Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara | 1 | Jumlah kegiatan Bimtek bagi ASN dalam organisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah | Kegiatan bintek bagi ASN dalam organisasi pengadaan Barang/ Jasa | Bagian Pengendalian Pembangunan | setda |
| | | | 2 | Tersusunnya analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di OPD | Jumlah OPD yang sudah menyusun dokumen anjab, ABK, dan evajab | Bagian Organisasi | setda |
| | | | 3 | Meningkatnya kompetensi Aparatur | Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forkompanda | Bagian Organisasi | Setda |
| 3. | | Meningkatnya Penyerapan Anggaran | 1 | Persentase penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu | Jumlah paket pekerjaan selesai tepat waktu dibagi jumlah | Bagian Pengendalian | Setda |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|--|--|---|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | <p>2 Jumlah tenaga terampil kontruksi yang bersertifikat LPJK</p> <p>3 Persentase monitoring pelaksanaan pekerjaan</p> <p>2 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah</p> <p>3 Presentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran</p> | <p>seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%</p> <p>Tenaga terampil kontruksi yang lulus sertifikat SKT LPJK tahun berkenaan</p> <p>Julah kegiatan monitoring paket pekerjaan dibagi jumlah seluruh paket pekerjaan dikalikan 100%</p> <p>Ada/tidak ada</p> <p>Persentase capaian kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun N</p> | <p>Pembangunan</p> <p>Bagian Pengendalian Pembangunan</p> <p>Bagian Pengendalian Pembangunan</p> <p>Bagian Umum</p> <p>Bagian Umum</p> <p>Bagian Umum</p> | <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> |
| 4. | | Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur | <p>1 Terlaksananya pelaksanaan pelayanan masyarakat terpadu di kecamatan</p> <p>2 Terlaksananya peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala desa terpilih nilai IKM Setda</p> <p>4 Tersusunnya Roadmap RB dan renstra Setda</p> <p>5 Presentase OPD yang telah melaksanakan SOP</p> <p>6 Presentase jumlah aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tertangani</p> | <p>Jumlah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI, hari jadi Kabupaten Batang, dan pelantikan kepala desa terpilih</p> <p>Nilai IKM setda tahun N</p> <p>Ada/ tidak</p> <p>Perangkat daerah yang sudah melaksanakan SOP dibagi jumlah perangkat daerah dikalikan 100%</p> <p>Jumlah aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang masuk dikalikan 100%</p> | <p>Bagian Pemerintahan</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Organisasi</p> | <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab | |
|----|------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 5. | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>e-Government</i>) | 7 | Presentase penerima hibah yang melengkapi persyaratan pencairan | Jumlah penerima hibah yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100% | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 8 | Presentase penerima hibah tepat sasaran | Jumlah penerima hibah yang tepat sasaran dibagi jumlah pengajuan hibah dikalikan 100% | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 9 | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan tahun N | Bagian Umum | Setda |
| | | | 1 | Presentase publikasi kegiatan pemerintahan Kab. Batang | Jumlah kegiatan pemerintahan yang diliput/diberitakan | Bagian Humas | Setda |
| | | | 2 | Presentase dokumentasi kegiatan pemerintah Kab. Batang | Jumlah kegiatan yang didokumentasikan foto dan video dibagi jumlah kegiatan yang diliput | Bagian Humas | Setda |
| | | | 3 | Jumlah pertemuan kegiatan kehumasan dengan OPD dan media massa | Jumlah pertemuan bakohumas dan media gatering | Bagian Humas | Setda |
| | | | 4 | Presentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu | Jumlah perangkat daerah yang laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah seluruh PD dikalikan 100% | Bagian Pengendalian Pembangunan | Setda |
| | | | 5 | Presentase perangkat daerah yang lengkap dokumen pengadaan barang/jasa | Jumlah pengajuan kelengkapan dokumen pengadaan dibagi jumlah surat keterangan yang terbit dikalikan 100% | Bagian Pengendalian Pembangunan | Setda |
| | | | 6. | | Tersusnya Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Umum Strategis yang melibatkan stakeholder | 1 | Presentase jumlah Raperda yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam propempera |
| | | | 2 | Presentase jumlah Raperbup | Jumlah raperbup yang telah | Bagian Hukum | Setda |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|--|--|---|--|--------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | Presentase jumlah rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah diharmonisasi sesuai pengajuan dari OPD | yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam propempera | Jumlah rancangan SK yang telah diharmonisasi dibagi jumlah target rancangan yang telah di harmonisasi sesuai pengajuan dari OPD dikali 100% | Bagian Hukum | Setda | |
| 4 | Presentase jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan gugatan perdata dan TUN yang masuk | Jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah perkara hukum yang masuk dikalikan 100% | Presentase jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan permasalahan hukum yang ada dan atau pengajuan kajian hukum dari OPD | Jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan dibagi jumlah pengajuan kajian dikali 100% | Bagian Hukum | Setda |
| 6 | Presentase jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi / penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan berdasarkan RENJA | Jumlah masyarakat yang menghadiri sosialisasi /penyuluhan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang menghadiri sosialisasi/ penyuluhan hukum sesuai renja dikali 100% | Presentase jumlah rakor dan pembinaan SJDI berdasarkan RENJA | Jumlah rakor dan pembinaan SJDI yang telah dilaksanakan dibagi target rakor dan pembinaan SJDI sesuai renja dikalikan 100% | Bagian Hukum | Setda |
| 8 | Presentase jumlah anggota Pampel RANHAM yang | Jumlah anggota pampel RANHAM yang mengikuti | Bagian Hukum | Setda | | |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|--|--|--|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | mengikuti rakor HAM | rakor HAM dibagi target jumlah anggota panpel RANHAM yang mengikuti rakor HAM sesuai renja dikalikan 100% | Bagian Hukum | Setda |
| | | | 9 Presentase jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang tersebarluaskan brdasarkan RENJA | jumlah produk hukum daerah dan per UJan yang disebarkanluaskan dibagi target produk hukum daerah dan per UJan yang disebarkanluaskan sesuai renja dikalikan 100% | Bagian Hukum | Setda |
| | | | 10 Presentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum | Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum dibagi jumlah target masyarakat yang mendapat layanan bantuan hukum yang ada dikalikan 100% | Bagian Hukum | Setda |
| 7 | | Terbentuknya mental aparatur dalam mendukung budaya kerja | terbentuknya Kelompok Budaya Kerja dan Gugus Kendali Mutu di setiap OPD | Jumlah OPD yang membentuk KBK dan GKM | Bagian Organisasi | Setda |
| 8 | | Terselenggaranya Koordinasi Kinerja secara Efektif | <p>1 Fasilitasi koordinasi pengembangan dunia usaha</p> <p>2 Produktifitas dan kemandirian melalui usaha UMKM</p> <p>3 Partisipasi UMKM yang mengikuti pameran</p> <p>3 Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati dalam daerah</p> | <p>Jumlah koordinasi pengembangan dunia usaha</p> <p>Jumlah UMKM yang mampu bersaing dan mandiri</p> <p>Jumlah UMKM yang mengikuti pameran</p> <p>Jumlah perjalanan dinas Bupati dan Wabup</p> | <p>Bag. Perekonomian</p> <p>Bagian Perekonomian</p> <p>Bagian Perekonomian</p> <p>Bagian Umum</p> | <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> <p>Setda</p> |
| 9 | | Terselenggaranya Kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Stakeholder | <p>1 Fasilitasi koodinasi peningkatan produksi, terpenuhinya sarana produksi bagi petani</p> <p>2 Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR</p> | <p>Jumlah koordinasi terkait produksi pertanian</p> <p>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR dibagi seluruh UMKM yang terdata di SIKP dikalikan 100%</p> | <p>Bagian Perekonomian</p> <p>Bagian Perekonomian</p> | <p>Setda</p> <p>Setda</p> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Panggung jawab | |
|----|------------------|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| | | | 3 | Deviden yang disetorkan ke kab. Batang | Jumlah deviden yang disetor | Bagian Perkeonomian | Setda |
| | | | 4 | Data sarana ibadah Kab. Batang | Jumlah sarana ibadah di Kab. Batang | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 5 | Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi | Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 6 | Jumlah TPHD / TKHD yang tersedia sesuai perhitungan kuota haji | Jumlah TPHD/TKHD | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 7 | Jumlah Kholifah gori, hafiz, dan mufasir | Jumlah Kholifah gori, hafiz, dan mufasir | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 8 | Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan | Jumlah penyelenggaraan tarling di 15 kecamatan | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 9 | Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional | Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional | Bagian Kesra | Setda |
| | | | 10 | Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak ke 3 | Jumlah pelaksanaan kerjasama / kesepakatan bersama lingkup dalam negeri, luar negeri, dan pihak ke 3 | Bagian Humas | Setda |
| | | | 11 | Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah | Jumlah perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati ke luar daerah | Bagian Umum | Setda |
| | | <i>Sekretariat DPRD</i> | | | | | |
| 1 | | Terwujudnya SDM aparatur yang profesional | 1 | Pegawai yang mengikuti pelatihan / workshop dst | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/ workshop | Bagian Administrasi Kesekretariatan | <i>Sekretariat DPRD</i> |
| | | | 2 | Bintek / workshop yang diselenggarakan untuk SDM Setwan | Jumlah bintek/ workshop untuk SDM Setwan | Bagian Administrasi Kesekretariatan | <i>Sekretariat DPRD</i> |
| 2 | | Terwujudnya SDM legislatif yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya | 1 | Anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ workshop | Bagian Legislasi | <i>Sekretariat DPRD</i> |
| | | | 2 | Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM | Jumlah Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM | Bagian Legislasi | <i>Sekretariat DPRD</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|--------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | | Terwujudnya pelayanan administrasi yang tertib dan memuaskan | 1 Prosentase laporan/ risalah rapat yang dibuat 2 Laporan yang dikirim tepat waktu 3 Aduan yang ditindaklanjuti Sekwan untuk diajukan/ ditindaklanjuti pada Pimpinan DPRD | Laporan/ Risalah yang dibuat dibagi jumlah laporan dikali 100% Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu Jumlah aduan yang ditindaklanjuti | Bagian Legislasi Bagian Legislasi | Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD |
| 4 | | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang representatif | Prosentase sarana prasarana kondisi baik | Jumlah sarana dan prasarana kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana yang ada dikalikan 100% | Bagian Administrasi Kesekretariatan | Sekretariat DPRD |
| 5 | | Tertelaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan sidang DPRD dan penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | 1 Rapat-rapat yang difasilitasi/diselenggarakan 2 Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | Jumlah rapat-rapat yang diselenggarakan Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan | | Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD |
| <i>Inspektorat</i> | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas hasil pengawasan | 1 Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal 2 Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial) 3 Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan | Jumlah temuan tahun berjalan dibagi jumlah pada tahun sebelumnya Jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah aduan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV Irbanwil I/II/III/IV Irbanwil I/II/III/IV | | Inspektorat Inspektorat Inspektorat |
| 2. | Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD | Opini Laporan Keuangan Pemda | Perbandingan opini BPK tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | | Inspektorat |
| 3. | Meningkatnya kualitas LAKIP | 1 Nilai hasil evaluasi LAKIP | Jumlah PD yang memiliki nilai | Irbanwil | | Inspektorat |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | Pemda dan LAKIP OPD | 1 pemda | evaluasi sangat baik | I/II/III/IV | |
| | | | 2 Jumlah OPD yang nilai LAKIPnya meningkat dari tahun sebelumnya | Rasio perolehan nilai evaluasi LKJIP PD tahun berjalan dan tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | |
| 4. | | Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan | Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu | Jumlah temuan tahun berjalan yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan sampai dengan akhir tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | Inspektoral |
| 5 | | Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan | 1 Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat | Jumlah SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | Inspektoral |
| | | | 2 Jumlah SDM bersertifikat auditor | Jumlah SDM bersertifikat auditor tahun berjalan dibagi dengan jumlah sampai dengan akhir tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | Inspektoral |
| 6 | | Meningkatnya integritas SDM pengawas | Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran kode etik aparat pengawas | Jumlah aduan dibagi dengan jumlah jumlah aduan sampai dengan akhir tahun sebelumnya | Irbanwil I/II/III/IV | Inspektoral |
| | | | <i>Disdikbud</i> | | | |
| 1 | | Meningkatnya proporsi penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal | 1 Rata-Rata Lama Sekolah | Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan 100% | | <i>Disdikbud</i> |
| | | | 2 Harapan Lama Sekolah | | | <i>Disdikbud</i> |
| | | | 3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif | Jumlah penduduk usia produktif dapat baca dan tulis dibagi jumlah penduduk usia produktif | | <i>Disdikbud</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|------------------|--|---|--|---|------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | | Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsive dan partisipatif | Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1 / D4 | Jumlah guru yang berkualifikasi S1/ D4 dibagi jumlah guru yang ada dikalikan 100% | Kabid ketenagaan | Disdiktbud |
| 3 | | Meningkatnya upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui penguatan nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal | Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan | Jumlah festival seni di daerah dibagi jumlah peristiwa budaya yang diselenggarakan Pemda dikalikan 100% | Kabid Kebudayaan | Disdiktbud |
| 4 | | Meningkatnya profesional dan efektivitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan dengan menguatkan kerjasama dan kemitraan serta pelibatan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan | Nilai SKM terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan | Sekretariat | Disdiktbud |
| <i>Satpol PP</i> | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 1 | Jumlah Linmas per Desa / Kelurahan | Jumlah penduduk Kab. Batang dibagi 10.000 penduduk dikalikan target | Kabid Linmas | <i>Satpol PP</i> |
| | | 2 | Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa / Kelurahan | Jumlah pos kampling Kab. Batang dibagi jumlah desa dan kelurahan di Kab. Batang | Kabid Gakda | <i>Satpol PP</i> |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup | 1 | Prosentase jumlah pelanggaran terhadap perda yang diselesaikan dibanding jumlah pelanggaran Perda dan / atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan | Jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dibagi jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan kali 100% | Kabid Tranitib | <i>Satpol PP</i> |
| | | 2 | Tertaksananya cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di | Jumlah regu dikalikan jumlah personil anggota patroli dibagi jumlah kecamatan | Kabid Tranitib | <i>Satpol PP</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|-----------------|---|---|--|---|------------|------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | | Meningkatnya standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran | seluruh kecamatan Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | Jumlah satgas damkar yang memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi | | Satpol PP |
| 4 | | Meningkatnya cakupan mobil damkar yang layak pakai dalam wilayah manajemen kebakaran (W/MK) | Jumlah mobil pemadam kebakaran 3.000 liter pada wilayah manajemen kebakaran (W/MK) | Jumlah W/MK memiliki mobil/mesin damkar layak pakai | | Satpol PP |
| <i>DP3AP2KB</i> | | | | | | |
| 1. | Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dibagi jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang ada | | <i>DP3AP2KB</i> |
| 2. | Peserta KB aktif dan peserta KB baru | | 1 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 2 Rata-rata jumlah anak perkeluarga | Jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur Jumlah anak dibagi jumlah keluarga | | <i>DP3AP2KB</i> <i>DP3AP2KB</i> |
| 3. | Menurunnya PUS yang ber-KB tidak terlayani | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (Unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani dibagi jumlah PUS | | <i>DP3AP2KB</i> |
| 4. | Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB | | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Jumlah anggota BKB yang ber-KB dibagi jumlah anggota BKB | | <i>DP3AP2KB</i> |
| 5. | Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB | | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | Jumlah PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS | | <i>DP3AP2KB</i> |
| 6. | Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB | | Ratio penyuluh KB / petugas Lapangan 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 Desa / Kelurahan | Jumlah penyuluh KB/petugas lapangan dibagi Jumlah desa/kelurahan | | <i>DP3AP2KB</i> |
| 7. | Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) | | Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan | Jumlah PPKBD dibagi jumlah desa/ kelurahan | | <i>DP3AP2KB</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|-----------------------------------|------------------|--|---|---|------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 8. | | Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi kependudukan dan KB berbasis TI | 1 PPKBD Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa / kelurahan | Jumlah penyedia data mikro keluarga dibagi desa/ kelurahan | | DP3AP2KB |
| <i>Dimas Pangan dan Pertanian</i> | | | | | | |
| 1. | | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase peningkatan produksi pertanian | Jumlah produksi produk pertanian tahun N dibandingkan dengan tahun N-1 dikalikan 100% | | Dispaperta |
| 2 | | Meningkatnya ketersediaan pangan utama (Food Availability) | 1 Ketersediaan bahan pangan utama a. beras b. jagung | Produksi gabah kering panen dikurangi angka susut (benih, pakan, terececer, susut) dikonversi dengan rendeman beras 62,74% Produksi jagung dikurangi angka susut atau dikalikan dengan angka konversi jagung 89% | | Dispaperta |
| | | | 2 Prosentase penguatan cadangan pangan daerah | Jumlah cadangan pangan kabupaten di bagi standar standar cadangan pangan kabupaten dikali 100% | | Dispaperta |
| | | | 3 Skor pola pangan harapan daerah | Hasil kali dari persen energi dari kelompok pangan dengan bobot | | Dispaperta |
| 3. | | Meningkatnya jumlah SDM pertanian | Peningkatan kinerja penyuluh pertanian | Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah penyuluh pertanian yang diikuti dalam DPA kegiatan dikali 100 | | Dispaperta |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penganggung jawab |
|-------------------------------|------------------|--|---|--|---|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4. | | Meningkatnya daya saing produk pertanian | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB | Kontribusi pertanian dibagi PDRB ADHB | | Disparpora |
| <i>Dinas Lingkungan Hidup</i> | | | | | | |
| 1. | | Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Jumlah pelaku usaha/perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) | Jumlah pelaku usaha / perusahaan yang sudah memiliki ijin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) | Kabid Tata Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2. | | Terwujudnya air sungai yang bersih tidak tercemar | Jumlah sungai | Jumlah pengambilan uji sampel air dibagi jumlah sungai | Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3. | | Peningkatan Ruang Terbuka Hijau | Rasio Ruang Terbuka Hijau | Jumlah kawasan lindung dibagi jumlah ruang terbuka hijau | Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4. | | Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan | Persentase penanganan sampah | Jumlah penduduk per 1.000 dibagi jumlah bank sampah dikalikan 100% | Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup |
| <i>Disparpora</i> | | | | | | |
| 1. | | Peningkatan jumlah wisatawan | Meningkatnya jumlah wisatawan (nusantara/ asing) yang mengunjungi destinasi wisata di Kab. Batang | Jumlah wisatawan per tahun | Kabid Destinasi | Disparpora |
| 2. | | Obyek wisata yang ditangani | Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan | Jumlah obyek wisata yang dikelola selama 1 tahun | Kabid Destinasi | Disparpora |
| 3. | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Jumlah retribusi obyek wisata yang dikelola oleh disparpora dalam 1 tahun | Kabid Destinasi | Disparpora |
| 4. | | Persentase pemuda berwirausaha | Peningkatan kemampuan dan | Jumlah pemuda yang sudah | Kabid | |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|---------------------------|------------------|---|--|--|------------|--------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | pengetahuan pemuda | mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan berwirausaha | Pemasaran | |
| 5. | | Jumlah organisasi pemuda yang dibina | Jumlah organisasi pemuda yang dibina | Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun | Kabid PORA | Disparpora |
| 6. | | Jumlah organisasi olahraga yang di bina | Jumlah organisasi olahraga yang di bina | Jumlah organisasi olahraga yang dibina oleh disparpora dalam 1 tahun | Kabid PORA | Disparpora |
| 7. | | Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga di tingkat provinsi Jateng | Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti | Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga yang diikuti oleh disparpora selama 1 tahun | Kabid PORA | Disparpora |
| <i>DPMPPTSP dan Naker</i> | | | | | | |
| 1. | | Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang | 1 Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang | Jumlah realisasi proyek investasi | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 2 Rasio kepemintatan investasi | Jumlah pendaftaran investasi | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 3 Jumlah penyerapan tenaga kerja | Rasio daya serap tenaga kerja | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 4 Rasio pelayanan perijinan | Jumlah perijinan yang diterbitkan dibagi jumlah pelayanan perijinan | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 5 Jumlah izin usaha yang diterbitkan | Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan register pendaftaran dan register izin | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 6 Jumlah dokumen kajian | Jumlah buku/ dokumen laporan | | DPMPPTSP dan Naker |
| 2. | | Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja | 1 Tingkat kesempatan kerja | Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 2 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Jumlah penempatan tenaga kerja ditambah jumlah job kampasing | | DPMPPTSP dan Naker |
| 3. | | Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja | 1 Tingkat wirausaha baru | Jumlah pemuda berwirausaha dibagi pencari kerja dikali 100 | | DPMPPTSP dan Naker |
| | | | 2 Rasio pemuda berwirausaha | Jumlah pemuda wirausaha baru | | DPMPPTSP dan Naker |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penganggung jawab | |
|------------------------|------------------|--|-------------------|---|--|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| | | | | dibagi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan | | Naker | |
| | | | 3 | Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun | Jumlah permasalahan ketenagakerjaan (perselisihan antara pengusaha-pekerja terkait hak pekerja) | DPMPTSP dan Naker | |
| 4. | | Meningkatnya penempatan penyelenggaraan transmigrasi | 1 2 3 | Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Warga Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi | Jumlah KK yang minat transmigrasi Jumlah warga yang bertransmigrasi Jumlah KK dan anggota keluarga yang bertransmigrasi sesuai kuota dari provinsi Jawa Tengah | DPMPTSP dan Naker DPMPTSP dan Naker DPMPTSP dan Naker | |
| <i>Dinas Kesehatan</i> | | | | | | | |
| 1. | | Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian serta Peningkatan status Gizi Masyarakat | 1 2 3 4 | Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) Angka kematian umum pasien yang dirawat di RSUD (Gross Death Rate/ GDR) | Jumlah kematian ibu hamil, bersalin, nifas dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama dikali 100.000 Jumlah kematian anak usia kurang dari 1 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000 Jumlah kematian anak usia kurang dari 5 tahun dalam satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama di kali 1.000 Jumlah pasien keluar mati dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000 | Bidang Kesmas Bidang Kesmas Bidang Kesmas | Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|-------------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | 5 Angka pasien keluar yang meninggal >48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/ NDR | Jumlah pasien keluar mati >48 jam dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | 4 Case Notification Rate (CNR) kasus baru TB | Jumlah seluruh kasus baru TB dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000 penduduk | | Dinas Kesehatan |
| | | | 5 kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA) positif (Cure Rate / CR) | Jumlah penderita TB BTA + yang sembuh dibagi jumlah penderita TB BTA + yang diobati dikali 100 | | Dinas Kesehatan |
| | | | 6 angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate / IR DBD) | Jumlah kasus DBD yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | 7 Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate / NCDR) | Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | 8 angka kesakitan malaria (Annual Parasite Incidence / IR) | Jumlah penderita malaria positif yang ditemukan dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | 9 prevalensi Balita Gizi Buruk | Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan (berat badan/tinggi badan) dibagi jumlah balita yang ada dikalikan 100 | | Dinas Kesehatan |
| | DPU PR | | | | | |
| 1. | Jalan dan jembatan kondisi baik | | Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi pajang jalan kabupaten di daerah tersebut dikalikan 100% | Kabid prasarana jalan dan jembatan | DPU PR |
| 2. | Jaringan irigasi dalam kondisi baik | | Persentase irigasi kabupaten | Luas irigasi kabupaten dalam | Kabid Pengairan | DPU PR |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|--------------|------------------|---|--|---|--|------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3. | | Ruang terbuka hijau yang ditertibkan | 1 dalam kondisi baik 2 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB 3 Ketaatan terhadap RTRW 2 Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan | kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikalikan 100% Luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah ber HPL / HGB dikalikan 100% Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100% Luasan RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibagi luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan dikalikan 100% | Kabid Penataan Ruang Kabid Penataan Ruang Kabid Penataan Ruang | DPU PR DPU PR DPU PR |
| <i>DPRKP</i> | | | | | | |
| 1 | | Meningkatkan jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni | Prosentase rehabilitasi rumah layak huni | Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah rumah keseluruhan dikali 100% | Kabid Perumahan dan Pertanahan | <i>DPRKP</i> |
| 2 | | Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan | Persentase rumah tangga bersantasi | Jumlah rumah tangga bersantasi dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali 100% | Kabid pemukiman | <i>DPRKP</i> |
| 3 | | Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih/ air minum | Persentase rumah tangga pengguna air bersih | Jumlah rumah tangga penguasaan air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100% | Kabid pemukiman | <i>DPRKP</i> |
| 4 | | Menurunnya kawasan pemukiman kumuh perkotaan | Prosentase pemukiman kumuh | Luas lingkungan pemukiman kumuh dibagi jumlah luas wilayah dikalikan 100% | Kabid Perumahan dan Pertanahan | <i>DPRKP</i> |
| 5 | | Terwujudnya penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 1 Jumlah tanah pemda yang disertifikat 2 Prosentase penyelesaian kasus tanah | Tanah pemda yang bersertifikat tahun yang bersangkutan Jumlah kasus yang ditangani dibagi kasus tanah yang terdaftar dikalikan 100% | Kabid Perumahan dan Pertanahan Kabid Perumahan dan Pertanahan | <i>DPRKP</i> <i>DPRKP</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | | Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | 1 Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik 2 Prosentase drainase lingkungan dalam kondisi baik | Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah jalan lingkungan seluruhnya dikalikan 100% Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik dibagi jumlah drainase lingkungan seluruhnya dikalikan 100% | Kabid Pemukiman Kabid Pemukiman | DPRKP DPRKP |
| 7 | | Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman yang kondusif | Prosentase taman dalam kondisi baik | Jumlah taman yang tertata dibagi jumlah taman seluruhnya dikalikan 100% | Kabid Pemukiman | DPRKP |
| <i>Disdukcapil</i> | | | | | | |
| 1. | | Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh | 1 Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk 2 Rasio bayi ber-akta kelahiran 3 Rasio pasangan ber-akta nikah 4 Rasio akta kematian 5 Kepemilikan KTP | Jumlah penduduk usia >17 yang telah ber-KTP dibagi jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah Jumlah bayi berakte kelahiran dibagi jumlah bayi Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah Jumlah kematian yang sudah mempunyai akte kematian dibagi jumlah seluruh kematian Jumlah penduduk diatas 17 atau sudah menikah yang memiliki KTP | | <i>Disdukcapil</i> <i>Disdukcapil</i> <i>Disdukcapil</i> <i>Disdukcapil</i> <i>Disdukcapil</i> |
| <i>Diskominfo</i> | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang | 1 Jumlah jaringan komunikasi 2 Website milik pemerintah | Jumlah jaringan komunikasi Jumlah website OPD | Kabid Penyelenggaraan E-Government Kabid | <i>Diskominfo</i> <i>Diskominfo</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | daerah | | Penyelenggara n E- Government | |
| | | | 3 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | Jumlah KIM | Kabid layanan informasi dan statistik | <i>Diskominfo</i> |
| | | | 4 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi | Jumlah distribusi informasi per bulan | Kabid IKP | <i>Diskominfo</i> |
| | | | 5 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media online seperti website dan media lainnya | Jumlah distribusi informasi per bulan | Kabid IKP | <i>Diskominfo</i> |
| | | | 6 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat | Jumlah distribusi informasi per bulan | Kabid IKP | <i>Diskominfo</i> |
| | | | 7 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah / diskusi dan lokakarya | Jumlah distribusi informasi per bulan | Kabid IKP | <i>Diskominfo</i> |
| | | | 8 Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan balho | Jumlah distribusi informasi per bulan | Kabid IKP | <i>Diskominfo</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penganggung jawab | |
|----|------------------|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| | | | 9 | Jumlah penyiaran radio / TV lokal | Jumlah penyiaran radio | Kabid IKP | Diskominfo |
| 2. | | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | 1 | Jumlah sistem unggulan dalam smart city | Jumlah sistem informasi smart city | Kabid penyelenggaraan E-Government | Diskominfo |
| | | | 2 | Jumlah Desa yang menerapkan Smart Village | Jumlah desa yang menerapkan smart village | Kabid penyelenggaraan E-Government | Diskominfo |
| | | | 3 | Keberhasilan pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik melalui VPN | Persentase keberhasilan VPN | Kabid penyelenggaraan E-Government | Diskominfo |
| | | | 4 | Penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi | Persentase penyelenggaraan jaringan Komunikasi sandi | Kabid penyelenggaraan E-Government | Diskominfo |
| | | | 1 | Buku kabupaten Batang Dalam Angka | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |
| | | | 2 | Buku Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Dalam Angka | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |
| 3 | | Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan, pen anggaran dan pelaksanaan | 3 | Single Data Sistem | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |
| | | | 4 | Buku PDRB dan IHK | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |
| | | | 5 | Buku NTP dan Distribusi Pendapatan | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |
| | | | 6 | Info Grafis Kabupaten dalam Angka | Ada/tidak | Kabid layanan informasi dan statistik | Diskominfo |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|---------------------|------------------|--|---|---|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| <i>Dislutkanak</i> | | | | | | |
| 1 | | Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan | 1 Prosentase penyerapan anggaran pada program Non urusan | Realisasi penyerapan anggaran dibagi pagu anggaran dikalikan 100% | Sekretariat | <i>Dislutkanak</i> |
| 2. | | Terlaksananya sosialisasi, pendampingan usaha dan akses permodalan pada usaha pemasaran produk perikanan dan peternakan guna meningkatkan usaha dan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan dan peternakan | Tingkat konsumsi Ikan (kg/kapita/th) 2 Konsumsi Protein (gr/kapita/hr): - Daging - Telur - susu | Jumlah konsumsi ikan (kg) dibagi target konsumsi ikan daerah dikalikan 100% | Kabid Peternakan | <i>Dislutkanak</i> |
| 3. | | Terselenggaranya bantuan sarpras dan pembinaan/ pelatihan peningkatan ketrampilan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan perikanan dan peternakan | 1 Produksi Perikanan Tangkap 2 Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah produksi perikanan tangkap per tahun Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun | Kabid Perikanan tangkap Kabid Perikanan Tangkap | <i>Dislutkanak</i> <i>Dislutkanak</i> |
| 4. | | Tersedianya SDM dan sarpras pendukung pelayanan kesehatan hewan untuk meningkatkan ketersediaan pangan segar | Produksi hasil Ternak : -Daging (kg) -Susu (liter) -Telur (kg) | Jumlah produksi hasil ternak (daging) per tahun Jumlah produksi hasil ternak (susu) per tahun Jumlah produksi hasil ternak (telur) per tahun | Kabid Peternakan | <i>Dislutkanak</i> <i>Dislutkanak</i> <i>Dislutkanak</i> |
| <i>Dinas Sosial</i> | | | | | | |
| 1. | | Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | 1 PMKS yang berhasil direhabilitasi 2 PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial | PMKS yang berhasil direhabilitasi/PMKS yang berhasil dikali 100% PMKS yang berhasil diberikan perlindungan dan jaminan sosial/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100% | | <i>Dinas Sosial</i> <i>Dinas Sosial</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|--------------------|---|--|---|---|--|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 2. | | Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial | Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos | Rumah Tangga Miskin yang mengikuti Program penanggulangan kemiskinan/PMKS yang seharusnya diberikan perlindungan dan jaminan sosial dikali 100% | PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos/PSKS yang seharusnya aktif dalam pembangunan Kesos dikali 100% | Dinas Sosial |
| <i>Bapelitbang</i> | | | | | | |
| 1. | Tercapainya sasaran pembangunan daerah | Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD | Capaian pembangunan bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW dibagi target capaian pembangunan RPJMD dikalikan 100% | Bidang Sosbud, Ekonomi, dan IPW | <i>Bapelitbang</i> | |
| 2. | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran daerah | 1 Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran | Jumlah kegiatan yang ada di RRPD tahun N dibagi jumlah kegiatan yang ada di DPA tahun N dikalikan 100% | <i>Bapelitbang</i> | | |
| | | 2 Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah | Data dan informasi yang tersedia dalam perencanaan pembangunan dibagi data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dikalikan 100% | <i>Bapelitbang</i> | | |
| 3 | Meningkatnya perencanaan partisipatif yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat | Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang | Jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbang dibagi jumlah masyarakat yang diundang dalam musrenbang dikalikan 100% | Bidang Perencanaan | <i>Bapelitbang</i> | |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|---------------|------------------|---|---|---|--|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi perencanaan dan kelibangan daerah | Nilai SAKIP Bapelitbang | Hasil penilaian terhadap SAKIP oleh Inspektorat daerah | | Bapelitbang |
| 5 | | Meningkatnya Inovasi dalam berbagai sektor | Prosentase OPD Inovatif | Jumlah OPD inovatif dibagi jumlah OPD yang ada dikalikan 100% | Bidang Litbang | Bapelitbang |
| 6 | | Meningkatnya peran serta masyarakat/ stakeholder dalam kegiatan kelibangan daerah | Persentase hasil kelibangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah | Jumlah hasil kelibangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan pemerintah daerah dibagi hasil kelibangan yang ada dikalikan 100% | Bidang Litbang | Bapelitbang |
| BPKPAD | | | | | | |
| 1. | | Peningkatan jumlah wajib pajak | Persentase peningkatan jumlah wajib pajak | Jumlah wajib pajak tahun N dikurangi jumlah wajib pajak tahun N-1 dibagi jumlah wajib pajak tahun N-1 dikalikan 100% | Bidang Administrasi PAD | BPKPAD |
| 2. | | Penyusunan APBD tepat waktu | Tersusunnya APBD sesuai jadwal | APBD ditetapkan dibagi jadwal penetapan APBD dikalikan 100% | Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan | BPKPAD |
| 3. | | Peningkatan baku PBB | Persentase peningkatan baku PBB | Baku PBB akhir dikurangi baku PBB awal dibagi baku PBB awal dikalikan 100% | Bidang Administrasi PAD | BPKPAD |
| 4. | | Pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien | Persentase OPD yang menggunakan teknologi informasi | Jumlah OPD memanfaatkan SIMDA dibagi jumlah OPD dikalikan 100% | Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan | BPKPAD |
| 5. | | Desa Lunas PBB tepat waktu | Persentase desa Lunas PBB tepat waktu | Jumlah desa Lunas PBB dibagi jumlah desa dikalikan 100% | Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PEP | BPKPAD |
| 6. | | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | PAD tahun N dikurangi PAD tahun N-1 dibagi PAD tahun N- | Bidang Penagihan, | BPKPAD |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|------------|------------------|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7. | | Tertibnya pencatatan barang milik daerah | Persentase perangkat daerah yang melaporkan BMD tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah PD kirim lap BMD tepat waktu dibagi jumlah PD dikalikan 100% | Evaluasi dan Pelaporan PEP Bidang aset daerah | BPKPAD |
| 8 | | Realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan | Persentase realisasi penerbitan SP2D terhadap anggaran kas triwulan | SP2D terbit dibagi anggaran kas triwulan dikalikan 100% | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | BPKPAD |
| 9. | | Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu | Pelaporan keuangan daerah tepat waktu | Laporan keuangan dikirim dibagi batas akhir pengiriman laporan keuangan dikalikan 100% | Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan | BPKPAD |
| BKD | | | | | | |
| 1. | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | 1 Prosentase akurasi data kepegawaian 2 Prosentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu 3 jumlah penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu 4 Prosentase tertibnya arsip data kepegawaian | Jumlah realisasi perubahan data dibagi jumlah perubahan data kepegawaian dikali 100% Jumlah realisasi SK KP dibagi jumlah usulan SK KP ke BKN dikali 100% Jumlah realisasi SK Pensiun tepat waktu tahun N Jumlah arsip perubahan data kepegawaian yang diterima dibagi jumlah realisasi perubahan data kepegawaian tahun berjalan kali 100% | | BKD BKD BKD BKD |
| | | | 5 Jumlah peserta yang lolos STTD | Jumlah peserta yang lolos seleksi STTD dibagi tahun N | | BKD |
| | | | 6 Jumlah usulan formasi yang ditetapkan kemenangan RB | Jumlah formasi yang disetujui Kemapan RB tahun N | | BKD |
| 2. | | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta | 1 Prosentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN | Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berjalan dibagi jumlah pelanggaran disiplin | | BKD |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|-------------------|------------------|---|-------------------|--|--|-------------------|
| 1 | | meningkatkan kedisiplinan ASN | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | 2 | ASN tahun lalu dikali 100% | | BKD |
| | | | 2 | Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim | | BKD |
| | | | 3 | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis | | BKD |
| | | | 4 | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional | | BKD |
| | | | 5 | Jumlah ASN yang mengikuti tes kompetensi | | BKD |
| <i>Kesbangpol</i> | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan | 1 | 1 | | <i>Kesbangpol</i> |
| | | | 1 | Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang wawasan kebangsaan | Jumlah masyarakat penerima wasbang dibagi per 1000 elemen masyarakat dikali 100% | |
| 2 | | Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan bantuan partai politik | 2 | 2 | | <i>Kesbangpol</i> |
| | | | 2 | Persentase partai politik yang patuh dengan tata cara penggunaan bantuan keuangan parpol | Jumlah parpol yan menerima bantuan dibagi jumlah parpol yang tertib administrasi dikalikan 100% | |
| | | | 3 | 3 | | <i>Kesbangpol</i> |
| | | | 3 | Persentase pembinaan terhadap elemen masyarakat tentang pendidikan politik dan negeri | Jumlah peserta yang paham peddidikan politik dibagi jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik dikalikan 100% | |
| <i>BPBD</i> | | | | | | |
| 1. | | Persentase Daerah Rawan Bencana | 1 | 1 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 1 | 1 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 1 | 1 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 1 | 1 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 2 | 2 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 2 | 2 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 3 | 3 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 3 | 3 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 4 | 4 | | <i>BPBD</i> |
| | | | 4 | 4 | | <i>BPBD</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|-------------------------------|------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2. | | Persentase ketersediaan peta resiko bencana | Fasilitasi Kegiatan Kajian Resiko Bencana Kab. Batang | Jumlah peta resiko dibagi peta resiko bencana di Kabupaten Batang | | BPPD |
| <i>Dispermapdes</i> | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Jumlah kelompok binaan LPM dibagi jumlah LPM | Kabid kelembagaan adat dan sosbud | <i>Dispermapdes</i> |
| 2 | | Meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK | Kabid kelembagaan adat dan sosbud | <i>Dispermapdes</i> |
| 3 | | Meningkatnya jumlah LPM berprestasi | LPM berprestasi | Jumlah LPM berprestasi dibagi jumlah LPM dikalikan 100% | Kabid kelembagaan adat dan sosbud | <i>Dispermapdes</i> |
| 4 | | Meningkatnya jumlah PKK aktif | PKK aktif | Jumlah PKK aktif dibagi jumlah PKK dikalikan 100% | Kabid kelembagaan adat dan sosbud | <i>Dispermapdes</i> |
| 5 | | Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat total program pemberdayaan masyarakat dikalikan 100% | Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan | <i>Dispermapdes</i> |
| 6 | | Meningkatnya kapasitas aparatur pendes/ kelurahan | Kapasita aparatur pendes/ kelurahan | Jumlah aparatur pendes/ kelurahan yang telah mengikuti pelatihan dibagi jumlah aparatur desa yang ada dikalikan 100% | Kabid pemberdayaan desa dan kelurahan | <i>Dispermapdes</i> |
| 7 | | Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak | posyandu aktif | Jumlah balita aktif di kegiatan posyandu | Kabid kelembagaan adat dan sosbud | <i>Dispermapdes</i> |
| <i>Disperindagkop dan UKM</i> | | | | | | |
| 1 | | Meningkatkan Aktivitas ekonomi, melalui peningkatan kualitas Koperasi dan UKM | 1 Prosentase Koperasi Aktif | Jumlah koperasi yang menjalankan usahanya sesuai aturan dibagi jumlah koperasi | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|--|-------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | | yang ada di Kabupaten Batang dikalikan 100% | | |
| | | | 2 | Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa dibagi jumlah koperasi yang ada di Kab. Batang dikalikan 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 3 | Jumlah Koperasi yang dinilai dibagi Jumlah Koperasi yang wajib dinilai dikalikan 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 4 | Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan pelatihan dibagi jumlah koperasi yang ada dikalikan 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 5 | jumlah produk OVOP yang ada dibagi target Ovop kali 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 6 | Jumlah usaha mikro s/d tahun (n) dikurangi jumlah industri tahun (n-1) yang dibagi Jumlah Industri tahun (n-1) kali 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 7 | Jumlah Wira Usaha baru yang berproduksi/berkembang dibagi jumlah wira usaha yang dibina kali 100% | | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| 2 | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan menwujudkan Pasar yang baik dan repreneurstatif (Bersih dan tertata) | 1 | Prosentase Revitalisasi Pasar Rakyat | Prosentase jumlah Pasar rakyat yang direvitalisasi dibagi keseluruhan pasar rakyat yang ada dikalikan 100% | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 2 | Prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar | Jumlah Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n) dibagi Jumlah target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n) Kali 100% | <i>Disperindagkop dan UKM</i> |
| | | | 3 | Prosentase PKL yang diata dan | Jumlah PKL yang direlokasi | <i>Disperindagkop</i> |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|---|--|---|------------|------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | | Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, melalui pemantauan Pengawasan Peredaran Barang dan Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen | 1 Prosentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan | Nilai ekspor bersih th (n) dikurangi jumlah nilai ekspor tahun (n-1) dibagi nilai ekspor bersih tahun (n-1) kali 100% | | Disperindagkop dan UKM |
| 2 | 1 | Prosentase Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran | Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran Tahun (n) dibagi jumlah UMKM yang mengikuti pembinaan Tahun (n) kali 100% | | | Disperindagkop dan UKM |
| 3 | 2 | Prosentase Rata-rata Ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya | Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n) dikurangi rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n-1) dibagi Rata rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya Tahun (n-1) kali 100% | | | Disperindagkop dan UKM |
| 4 | 3 | Prosentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda Tera sah | Jumlah UTTTP bertanda tera sah tahun (n) dikurangi Jumlah UTTTP bertanda tera sah tahun (n-1) dibagi Jumlah UTTTP bertanda tera sah tahun(n-1) Kali 100% | | | Disperindagkop dan UKM |
| 5 | 4 | Prosentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK) | Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHK) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen | | | Disperindagkop dan UKM |
| 6 | 5 | Prosentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) | Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHB) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen | | | Disperindagkop dan UKM |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|----|------------------|---|---|---|------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | | Meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pelayanan di bidang industri | 1 Prosentase pertumbuhan industri 2 Prosentase Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHK) 3 Prosentase Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHB) 4 Prosentase Wira usaha baru yang mengikuti pelatihan | Jumlah Industri non formal s/d Tahun (n) dikurangi Jumlah Industri non formal s.d th (n-1) dikalikan 100% dibagi jumlah industri Non Formal s.d Tahun (n-1) Jumlah Industri s/d th n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri tahun n dikalikan 100% Jumlah PDRB Sektor Industri Terhadap PDRB(ADHB) dibagi Jumlah Total PDRB kali seratus persen Jumlah calon wira usaha baru yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah wira usaha baru yang mendaftar kali 100% | | Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM |
| 1 | Dishub | Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan lancar | 1 Persentase angkutan umum yang laik jalan 2 Persentase menurunnya tingkat pelanggaran tahun sekarang dikurangi jumlah 3 Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dijalan protokol pada jam sibuk 4 Rasio panjang jalan 5 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi | Jumlah kendaraan lulus uji dibagi jumlah KBWU dikalikan 100% pelanggaran tahun sebelumnya dibagi jumlah pelanggaran sebelumnya dikalikan 100% Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan = jumlah kecepatan rata-rata dibagi n Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan dikalikan 100% Jumlah penumpang puas/jumlah total penumpang dikalikan 100% | | Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|-------------|------------------|--|--|---|------------|--|
| 1 | | 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | | Meningkatnya keselamatan lalu lintas | Persentase penurunan angka kecelakaan | Jumlah kecelakaan tahun sekarang dikurangi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dibagi jumlah kecelakaan tahun sebelumnya dikalikan 100% | | Dishub |
| Disperpuska | | | | | | |
| 1 | | Meningkatkan dan mengembangkan jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan serta dokumen / arsip yang bernilai guna | 1 Meningkatkan dan mengembangkan jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan serta dokumen / arsip yang bernilai guna 2 Meningkatkan dan mengembangkan dokumen/ arsip bernilai guna 3 Jumlah arsip bernilai guna meningkat | Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah Menunjukkan jumlah arsip hasil kegiatan akuisisi kearsipan Menunjukkan peningkatan jumlah arsip yang tersimpan pada LKD | | Disperpuska Disperpuska |
| 2 | | Mengembangkan dan memperluas jasa layanan perpustakaan dan informasi serta pemanfaatan dokumen / arsip daam rangka pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat dan peran serta masyarakat | 1 Jumlah titik layanan bertambah 2 Peran serta masyarakat dalam melestarikan arsip/ dokumen 3 Jumlah pustaka berdasar sekolah/ gender 4 Jumlah bahan pustaka yang dipinjam 5 Jumlah judul yang dipinjam | Jumlah perpustakaan yang dilayani Jumlah arsip masyarakat yang diserahkan pada LKD Jumlah anggota perpustakaan berdasarkan jenis kelamin Jumlah buku perpustakaan yang dipinjam oleh pustaka Jumlah judul buku yang dipinjam oleh pustaka | | Disperpuska Disperpuska Disperpuska Disperpuska |
| 3 | | Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf perpustakaan dan kearsipan dalam bidang teknologi informasi | 1 Peningkatan jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem otomisasi layanan 2 Peningkatan kemampuan SDM pengelola perpustakaan dan | Jumlah SDM perpustakaan yang menggunakan sistem otomisasi perpustakaan Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek | | Disperpuska Disperpuska |

| NO | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | sumberdata | Penanggung jawab |
|------------------|------------------|---|---|--|------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | | Meningkatkan sarana dan prasarana jasa layanan perpustakaan, informasi, dan arsip | 1 Pemanfaatan teknologi informasi/ otomasi pengelolaan berbagai jenis perpustakaan 2 Akses arsip/ dokumen secara cepat 3 Penerapan sistem otomasi dalam temu kembali arsip/ dokumen | perpustakaan dan kearsipan Jumlah teknologi informasi/ otomasi perpustakaan yang dipergunakan Menunjukkan kecepatan dalam temu balik arsip | | Disperpuska Disperpuska Disperpuska |
| 5 | | Meningkatkan peran pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar membaca dan pelestarian arsip sebagai khasanah bangsa | 1 Layanan prima perpustakaan dan peningkatan kualitas jasa layanan 2 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan arsip/ dokumen meningkat | Jumlah unit pencipta yang menggunakan otomasi kearsipan Menunjukkan survey kepuasan pengunjung Jumlah kunjungan masyarakat pada LKD | | Disperpuska Disperpuska |
| <i>Kecamatan</i> | | | | | | |
| 1. | | Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (mudah, cepat dan memuaskan) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai IKM terhadap pelayanan masyarakat | | Kecamatan |
| 2. | | Meningkatkan ketentraman dan keterlibatan masyarakat | Jumlah Kasus Pencurian | Jumlah kasus pencurian per tahun | | Kecamatan |
| 3. | | Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang ekonomi produktif | Jumlah Keluarga Prasejahtera | Jumlah keluarga miskin pra sejahtera per tahun | | Kecamatan |

BUPATI BATANG,



WIHAJI